



SALINAN

# **BUPATI ROKAN HILIR**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN SEI MERANTI  
DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Wilayah Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN SEI MERANTI DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN

#### Pasal 2

Penetapan dan Penekasan batas wilayah Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Akar Belingkar dan Kepenghuluan Sei Meranti;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Kepenghuluan Sei Meranti;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Sungai Tapah; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu.

#### Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam dengan Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan dimulai dari titik batas Permendagri dengan TK.1 :  $1^{\circ} 23' 1,935''$  N- $100^{\circ} 24' 31,815''$  E, selanjutnya menuju timur laut ke Barat Oskar dengan TK.2 :  $1^{\circ} 23' 33,122''$  N - $100^{\circ} 27' 21,575''$  E;
- b. batas antara Kepenghuluan Sei Meranti dengan Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan dimulai dari titik batas Barak Oskar dengan TK.2 :  $1^{\circ} 23' 33,122''$  N - $100^{\circ} 27' 21,575''$  E,

selanjutnya menuju timur ke Rumah Pak Ngapak dengan TK.3 :  $1^{\circ} 23' 26,097''$  N  $-100^{\circ} 28' 42,810''$  E, selanjutnya menuju tenggara ke BOX CULVERT Km.2 dengan TK.4 :  $1^{\circ} 22' 18,627''$  N  $-100^{\circ} 29' 44,761''$  E, selanjutnya menuju tenggara ke Sungai Batang Kumu dengan TK.5 :  $1^{\circ} 20' 30,033''$  N  $-100^{\circ} 30' 17,127''$  E; dan

- c. batas antara Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam dengan Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan dimulai dari titik batas Sungai Batang Kumu dengan TK.5 :  $1^{\circ} 20' 30,033''$  N  $-100^{\circ} 30' 17,127''$  E, selanjutnya menuju barat daya mengikuti Sungai Batang Kumu sampai dengan TK.6 :  $1^{\circ} 20' 32,376''$  N  $-100^{\circ} 28' 49,244''$  E.

### BAB III PETA BATAS

#### Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

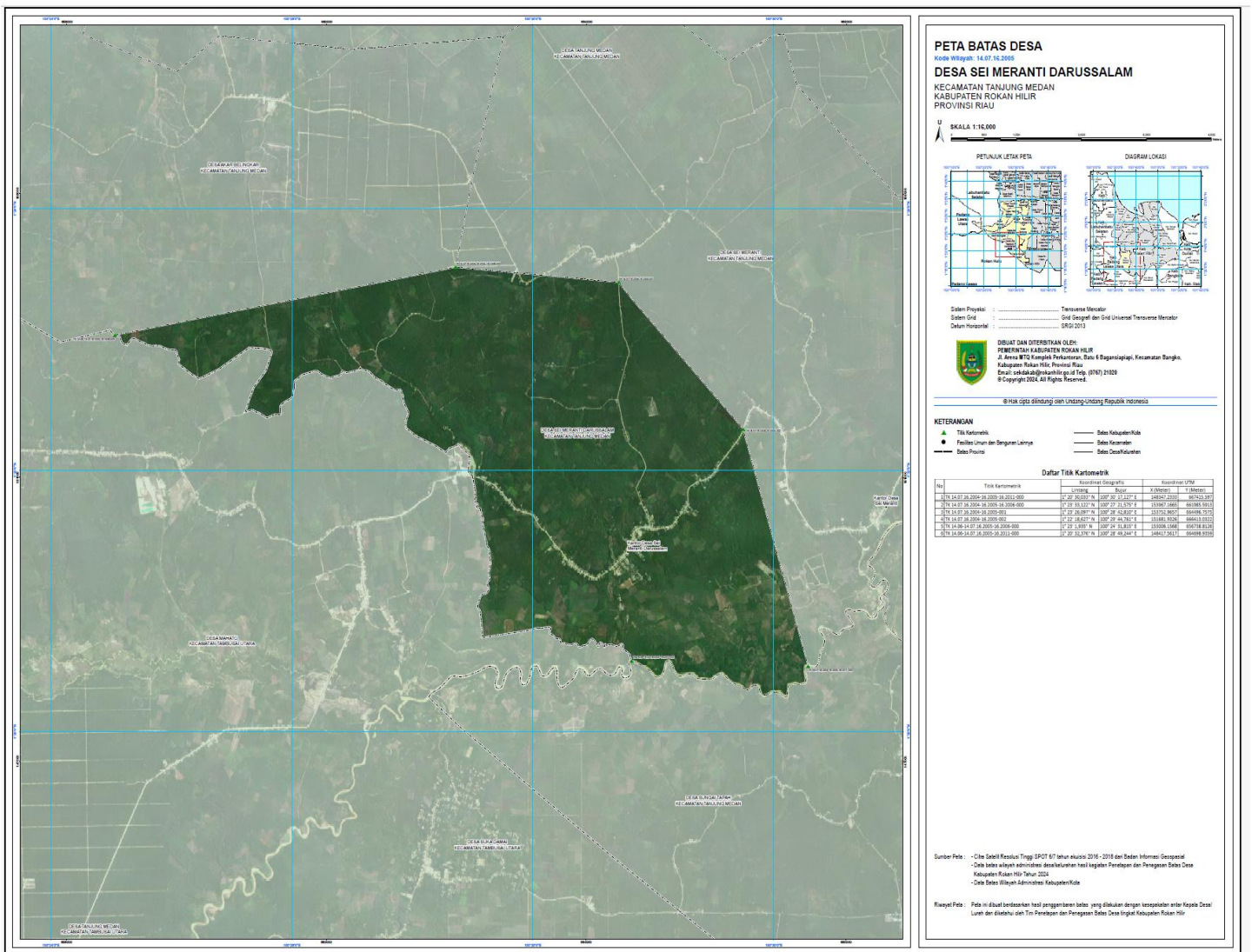
FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 58



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
 NOMOR 55 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGESAHAN BATAS WILAYAH  
 KEPENGHULUAN SEI MERANTI  
 DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG  
 MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN SEI MERANTI DARUSSALAM  
 KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG